

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu keamanan adalah satu dari banyaknya isu yang sering dibahas pada hubungan internasional yang seiring berjalannya waktu isu ini juga berkembang mengikuti berkembangnya teknologi juga, yang mengakibatkan penggunaan senjata sebagai alat militer juga berkembang. Dari perkembangan teknologi ini, muncul tipe senjata terbaru yang dapat mengakibatkan kehancuran yang lebih tinggi atau bisa juga disebut sebagai *Weapon Mass Destruction* (WMD) dengan nuklir sebagai contoh dari adanya WMD. Akibat dari fatalnya dampak yang bisa dihasilkan oleh nuklir menyebabkan kekhawatiran oleh banyak pihak yang kemudian mendorong adanya sebuah kebijakan yang membatasi adanya pengembangan dan kepemilikan senjata WMD yang dimiliki oleh negara lain bernama *Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang dibuat tanggal 1 Juli 1968. Terdapat lima negara yang diperbolehkan dalam mengoptimalkan senjata nuklir, yaitu Perancis, Rusia, China, Amerika Serikat, dan Inggris. Korea Utara sempat meratifikasi perjanjian ini pada tahun 1989. Meskipun tidak termasuk ke daftar lima negara yang diakui sebagai pemilik senjata nuklir, Korea Utara pada dasarnya tidak dilarang dalam pengembangan nuklir, tetapi Korea Utara terbukti melanggar NPT *treaty* yang ditandai adanya fasilitas pengembangan nuklir tersembunyi di Kota Yongbyon dan pada akhirnya keluar dari NPT di tanggal 10 Januari tahun 2003 (IAEA, 2025). Akibat dari peristiwa ini, munculah kekhawatiran dari beberapa negara di Asia Timur, khususnya Korea Selatan.

Dengan keluarnya Korea Utara dari NPT dan dengan banyak uji coba nuklir yang dilakukan setiap tahunnya, Korea Selatan pada akhirnya memutuskan untuk menetapkan sistem penangkal rudal dan nuklir yang bernama *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD). Diketahui jika Korea Selatan dan Amerika Serikat memiliki hubungan militer yang baik semenjak usainya perang Korea tahun 1953. Pemasangan sistem THAAD ini bisa mencerminkan eratnya kerjasama militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. THAAD sendiri adalah *Ballistic Missile Defense System* (BMDS) yang dimiliki oleh Amerika Serikat. THAAD dirancang untuk mencegah dan menghancurkan rudal balistik musuh yang terdeteksi melalui sistem, yang dapat mencari objek hingga 1.000 km baik di dalam maupun di luar atmosfer (Lockheed Martin, 2025)

Pemasangan THAAD ini diresmikan pertama kali oleh Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat di Korea Selatan yaitu Jenderal Curtis Scaparrotti pada tahun 2014 (Sang-Ho, 2014). Namun, implementasi THAAD di Korea Selatan terhambat dimana setelah diinisiasikannya THAAD oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat, terdapat respon dari China yang menyatakan kekhawatirannya terhadap pemasangan THAAD di Korea Selatan, karena adanya sistem THAAD ini bertentangan dengan kepentingan keamanan China. Hal ini membuat Park Geun Hye, mantan Presiden Korea Selatan berhati-hati terkait mengambil keputusan untuk memasang THAAD di Korea Selatan. Pada akhirnya, karena dipicu adanya uji coba nuklir oleh Korea Utara pada awal 2016, pada tanggal 22 Juli 2016 pemasangan THAAD di Korea Selatan resmi diumumkan dan THAAD ini mulai beroperasi pada bulan Mei 2017 (Backgrounder, 2017). Pemasangan THAAD ini

sendiri berlokasi di Kabupaten Seongju, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan (Seung-Woo, 2016).

Pemasangan THAAD dipicu melalui adanya percobaan misil dan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara yang juga secara geografis berdekatan dengan Korea Selatan. Uji coba nuklir dan misil juga telah banyak dilakukan oleh Korea Utara dari sebelum tahun 2016. Menurut situs resmi *Missile Defense Project*, uji coba misil dan nuklir yang dilaksanakan Korea Utara terus meningkat setiap tahunnya, dimana terhitung dari tahun 2012 terdapat 6 percobaan misil yang diterapkan oleh Korea Utara. Pada tahun 2013 jumlah ini meningkat, dimana terdapat 9 total uji coba nuklir dan juga misil, dimana sebanyak 8 uji coba misil dilakukan dan 1 kali percobaan nuklir dilakukan. Tahun 2014 jumlah ini meningkat dimana sebanyak 18 percobaan misil diselenggarakan oleh Korea Utara. Kemudian tahun 2015, percobaan misil dijalankan oleh Korea Utara sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 18 kali. Kemudian di Tahun 2016 percobaan nuklir dan juga uji coba misil yang diimplementasikan oleh Korea Utara meningkat yaitu sebanyak 23 kali dengan total 21 kali uji coba misil dan 2 kali uji coba nuklir. Adanya uji coba nuklir ini lah yang menjadi alasan Korea Selatan pada saat itu menginisiasikan THAAD di 2016. (Missile Threat, 2023). Walaupun mayoritas uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan uji coba misil bukan uji coba nuklir, tidak menjadi alasan Korea Selatan untuk tidak merasa terancam atas tindakan yang dilakukan Korea Utara.

Di lain sisi, China yang secara letak geografisnya cukup berdekatan dengan Korea Selatan merasa terancam atas adanya pemasangan THAAD. China merasa

jika penerapan THAAD di Korea Selatan ini bisa saja digunakan oleh Korea Selatan untuk memata-matai wilayah di China. Kemudian atas keresahan yang dirasakan oleh China, respon pertama kali yang dilakukan oleh China adalah dengan menggagalkan tur warga China ke Korea Selatan dan memboikot salah satu supermarket asal Korea Selatan yaitu supermarket Lotte yang beroperasi di China (Hyung, 2022). Selain itu juga pada sektor industri penayangan televisi yang berasal dari Korea Selatan, juga di boikot oleh China yang menyebabkan segala tayangan televisi dari Korea Selatan tidak di gagal tayangkan di China. Dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh China ini tentunya bisa merugikan Korea Selatan jika hal ini dilakukan dalam jangka yang panjang.

Oleh karena itu, Korea Selatan merespon dengan menginisiasikan normalisasi hubungan dengan China, yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan yaitu Kang Kyung-Hwa tanggal 30 Oktober 2017. Kemudian Kementerian Luar Negeri China menerima normalisasi hubungan merespon normalisasi hubungan yang diinisiasikan oleh Korea Selatan pada tanggal 31 Oktober 2017 (Elvira, 2020). Normalisasi hubungan yang diinisiasikan oleh Korea menghasilkan adanya *three no's policy* yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana terdapat tiga poin dalam kebijakan ini yang diberikan oleh Korea Selatan. Tiga poin tersebut menyatakan; (1) Tidak ada pemasangan THAAD tambahan, (2) Tidak berpartisipasi dalam jaringan pertahanan misil Amerika Serikat, dan (3) Tidak ada pembentukan aliansi militer trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang (Byong-Su, 2017). Dari diinisiasikannya *three no's policy* ini diharapkan bisa memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dengan China.

Pada tulisan yang ditulis oleh Decyani Permatasari (2019) yang berjudul “Analisis Penggunaan *three no’s* oleh Korea Selatan untuk Mengatasi Boikot di Cina Akibat *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD)” berfokus pada rumusan masalah yang ingin menjawab apa penyebab Korea Selatan menyepakati kebijakan *three no’s* dalam proses pemulihan hubungan diplomatik dengan China. Penulis dalam tulisan ini menggunakan teori interdependensi dengan strategi *linkage*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe eksplanatori. Dikatakan jika penerapan kebijakan *three no’s* merupakan tindakan yang tepat sebagai prasyarat normalisasi hubungan antara Korea Selatan dengan China dalam mengatasi keresahan China akibat diterapkannya THAAD di Korea Selatan, walaupun Korea Selatan tidak mendapat keuntungan apapun jika dilihat dari aspek keamanan namun secara ekonomi Korea Selatan mendapatkan keuntungan. Dikatakan juga jika strategi *linkage* yang dilakukan oleh Korea Selatan juga berhasil menghentikan boikot yang dilakukan China dalam industri budaya walaupun hanya secara perlahan.

Lalu pada tulisan milik Anggraining Tias (2020) yang berjudul “*South Korea And Chinese Conflict Over THAAD: How It Started And The Way It Ended*” berfokus dalam awal mulainya konflik antara Korea Selatan dengan China terkait dengan pemasangan sistem THAAD di Korea Selatan serta bagaimana konflik ini berakhir. Disebutkan oleh penulis jika dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan neo-realisme dengan metode kualitatif sebagai metodologi yang digunakan. Disebutkan juga jika pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian historis komparatif. Hasil pembahasan pada tulisan ini adalah, dengan

pemasangan THAAD di Korea Selatan, China merasa tidak aman dengan pemasangan THAAD ini sehingga China melakukan sanksi ekonomi sebagai respon atas ketidaksetujuan China terhadap pemasangan sistem anti misil dan nuklir di Korea Selatan. Dengan hukuman ekonomi yang diserahkan oleh China, respon yang diberikan oleh Korea Selatan adalah dengan menyepakati kebijakan *three no's*. Dalam pandangan neo-realisme, konflik ini merupakan upaya kedua negara dalam menerapkan *balance of power*. Sebagaimana asumsi kaum neorealis jika perdamaian akan tercapai jika kekuatan dalam sistem internasional seimbang.

Selanjutnya dari tulisan milik Bara Bhiswara (2019) yang berjudul “Analisis Teori Peran Dalam Kebijakan Instalasi Sistem *Terminal High Altitude Area Defense* (Thaad) Korea Selatan Pada Pemerintahan Moon Jae In 2017-2019”. Tulisan ini membahas bagaimana kebijakan Korea Selatan dalam menginstal dan mempertahankan THAAD sekaligus mengkonstruksi peran yang ingin dimainkan oleh Korea Selatan di Semenanjung Korea pada pemerintahan Moon Jae In. Tulisan ini menggunakan teori peran sebagai alat analisis kebijakan luar negeri milik Holsti dengan tipe penelitian eksplanatif dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis konten yang merupakan metode analisis konten komunikasi tertulis maupun verbal. Teknik pengumpulan data yang diambil penulis merupakan data yang diambil dari sumber primer dan sekunder dengan data primer yang diambil melalui situs resmi pemerintah yang dikumpulkan melalui situs resmi dan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dokumen resmi. Hasil penelitian dari tulisan ini, ditemukan jika terdapat tiga peran utama yang dikonsepsikan, yaitu Korea Selatan sebagai *regional security hub*, *self-reliant country*, dan *U.S. faithful ally*. Sedangkan

ekspektasi peran yang penulis temukan bersumber dari AS terkait strategi *extended deterrence alliance*, dan ekspektasi Tiongkok untuk mendesak Korea Selatan mencabut sistem THAAD.

Berdasarkan latar belakang diketahui jika penerapan THAAD di Korea Selatan memicu respon yang buruk dari China. Kemudian dari tulisan ilmiah yang telah dibahas sebelumnya juga bisa disimpulkan jika belum ada yang membahas apa alasan Korea Selatan menerapkan kebijakan *three no's* dengan menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri William D. Coplin. Tulisan pertama sendiri membahas tentang penyebab diterapkannya kebijakan *three no's* di Korea Selatan tetapi dengan menggunakan teori interdependensi dengan strategi *linkage*, sedangkan untuk tulisan kedua lebih berfokus pada awal mula konflik antara Korea Selatan dengan China sampai pada penyelesaian konflik antara kedua negara dengan menggunakan pendekatan neo-realisme, dan untuk tulisan ketiga membahas kebijakan Presiden Moon Jae In dalam mempertahankan THAAD di Korea Selatan menggunakan teori peran milik Holsti, tidak berfokus pada kebijakan *three no's*. Jadi bisa disimpulkan jika jeda penelitian pada tulisan ini adalah digunakannya teori pengambilan William D. Coplin dan lebih spesifik membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi diambilnya kebijakan *three no's* oleh Korea Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang dan jeda penelitian tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Apa saja determinan yang mempengaruhi diambilnya**

kebijakan *Three No's* oleh Korea Selatan kepada China pasca diterapkannya THAAD tahun 2017?"

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara umum

Secara umum, penelitian ini ditulis untuk memenuhi nilai mata kuliah skripsi yang menjadi syarat lulus dan untuk meraih gelar sarjana melalui Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses diambilnya kebijakan luar negeri oleh Korea Selatan yaitu kebijakan *three no's* menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri William D. Coplin.

1.4 Kerangka Pemikiran

Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri William D. Coplin

Mengutip dalam buku William D. Coplin dengan judul *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview* (1974) dijelaskan jika terdapat 4 determinan yang mempengaruhi diambilnya kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor yang pertama ada kondisi politik domestik, faktor kedua ada kondisi militer dan ekonomi dalam negeri, faktor ketiga ada pengambil keputusan, dan yang terakhir ada konteks internasional. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan oleh penulis diatas, penulis akan mendeskripsikan bagaimana faktor-faktor pengambilan

keputusan luar negeri milik William D. Coplin dapat mempengaruhi diambilnya keputusan kebijakan luar negeri.

1.4.1 Kondisi Domestik

Faktor yang pertama yaitu bagaimana kondisi domestik suatu negara, hal ini bisa dilihat dari bagaimana sistem pemerintahan dari suatu negara, misalnya apakah suatu negara ini merupakan negara yang demokratis atau tidak. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi diputuskannya suatu kebijakan. Selanjutnya dijelaskan oleh Coplin jika dalam menganalisis kondisi domestik suatu negara terdapat istilah yang disebut *policy influencers* oleh Coplin dimana *policy influencers* ini dijelaskan sebagai aktor-aktor domestik yang dapat mempengaruhi perumusan keputusan luar negeri sebuah aktor negara tertentu. William D. Coplin kemudian membagi *policy influencers* menjadi 4 kategori yaitu: *Bureaucratic Influencer*, *Partisan Influencer*, *Interest Influencer*, *Mass Influencer*.

1.4.1.1 Bureaucratic Influencer

Bureaucratic influencer dijelaskan sebagai suatu individu atau organisasi yang ada dalam sistem pemerintahan yang bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Istilah ini digunakan oleh Coplin untuk merujuk kepada adanya suatu individu atau organisasi di dalam lembaga pemerintahan yang membantu pengambil keputusan dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri tertentu. Dijelaskan juga jika seorang birokrat sangat berpengaruh dalam proses diambilnya suatu kebijakan luar negeri, karena birokrat ini dirasa memiliki akses yang dekat dan juga langsung kepada pengambil keputusan. Di lain sisi, terkadang pengambil keputusan juga membutuhkan keberadaan birokrat ini untuk

memberikan informasi-informasi penting maupun hanya sekedar meminta bantuan kepada birokrat untuk memutuskan suatu kebijakan luar negeri.

1.4.1.2 *Partisan Influencer*

Partisan Influencer dijelaskan sebagai Partai politik yang bisa mempengaruhi diambil atau tidaknya suatu kebijakan luar negeri. Tujuannya adalah untuk mengubah keinginan masyarakat menjadi keinginan politis berupa keinginan atau desakan kepada pengambil keputusan yang memutuskan kebijakan luar negeri. Partai ini kemudian berusaha untuk mempengaruhi diambilnya keputusan kebijakan luar negeri dengan cara menekan atau meminta Pemerintah negaranya. Kemudian juga disebutkan jika kemampuan *partisan influencer* ini bisa dikatakan cukup terbatas dimana dijelaskan oleh Coplin jika alasan utama *partisan influencer* memiliki kemampuan yang terbatas adalah karena *partisan influencer* ini sendiri lebih cenderung untuk fokus kepada kondisi politik dalam negeri ketimbang kondisi politik luar negeri. Hal tersebut dirasa bisa terjadi karena isu luar negeri biasanya memiliki kompleksitas yang lebih tinggi sehingga biasanya susah dipahami oleh para legislator. Walaupun begitu, Partai Politik tetap memegang peran yang cukup signifikan dalam proses penentuan strategi luar negeri suatu negara, karena pengambil keputusan sendiri membutuhkan dukungan Partai Politik untuk mempertahankan rezim dan biasanya dimintai pendapatnya tentang hal tertentu, tidak terkecuali keputusan dalam memutuskan diambilnya kebijakan luar negeri suatu negara.

1.4.1.3 *Interest Influencer*

Interest Influencer dijelaskan sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan tertentu yang sama dan dapat mempengaruhi diambil atau tidaknya suatu kebijakan luar negeri. Dijelaskan oleh Coplin jika kelompok kepentingan mempengaruhi diambilnya keputusan kebijakan luar negeri dengan melakukan gerakan kolektif dengan kepentingan-kepentingan yang diinginkan. Coplin menyebutkan jika kelompok kepentingan ini biasanya bersifat ekonomis karena ekonomi biasanya menjadi alasan individu bertindak secara kolektif. Namun, tidak hanya kepentingan ekonomis saja yang menjadi alasan suatu kelompok kepentingan untuk melakukan tindakan kolektif, kepentingan non-ekonomis juga bisa menjadi alasan suatu kelompok kepentingan melakukan tindakan kolektif. Kepentingan non-ekonomis ini dijelaskan oleh Coplin sebagai adanya ikatan etnis atau geografi, atau adanya persamaan lainnya.

1.4.1.4 *Mass Influencer*

Kemudian *policy influencer* yang terakhir ada *Mass Influencer* yang dijelaskan sebagai suatu opini publik yang bisa berdampak pengambilan keputusan strategi luar negeri. Khususnya pada negeri yang menganut sistem demokrasi dimana opini rakyat harus dipertimbangkan untuk menjaga sistem demokrasi yang ada. Ditambah dengan sistem pemungutan suara dalam negara demokrasi melalui pemilihan umum dimana pengambil keputusan dipilih oleh rakyat itu sendiri. Disebutkan juga jika pengambilan keputusan kebijakan luar negeri nantinya akan disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan bagaimana efek dibentuknya kebijakan luar negeri ini terhadap opini publik. Tetapi disebutkan juga jika dengan

mempertimbangkan peran pandangan publik bukan berarti pengambil keputusan dipengaruhi oleh adanya opini publik. Menurut coplin, pandangan publik digunakan sebagai alat oleh pengambil keputusan dalam merasionalisasi keputusan dalam diambilnya keputusan kebijakan luar negeri.

1.4.2 Kondisi Ekonomi dan Militer

Faktor kedua adalah keadaan ekonomi dan militer negara. Faktor ini digunakan karena seorang pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan militer dan ekonomi negaranya dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Dijelaskan oleh Coplin jika keadaan ekonomi dan militer dapat digunakan sebagai instrumen politik luar negeri dimana kondisi ini diasosiasikan sesuai adanya konsep negara terbelakang dan negara maju. Menurut Coplin suatu negara dianggap memiliki kondisi ekonomi yang baik apabila (1) nilai *Gross National Product* (GDP) dan *Gross Domestic Product* (GNI) relatif tinggi, dan (2) memiliki kapasitas produksi yang cukup besar, suatu negara dianggap memiliki kemampuan militer yang baik jika (1) memiliki angkatan bersenjata konvensional dan terlatih dengan baik, dan (2) ketergantungan terhadap sumber-sumber luar negeri. Dijelaskan juga oleh Coplin jika dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, negara tersebut akan memiliki peluang yang besar dalam “pergaulan” politik internasional. Atau bisa dikatakan juga jika kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat mempengaruhi posisi suatu negara di politik internasional.

1.4.3 Pengambil Keputusan

Pengambil keputusan juga merupakan manusia yang merespon situasi tertentu dimana pengambil keputusan harus bertanggung jawab terhadap manusia

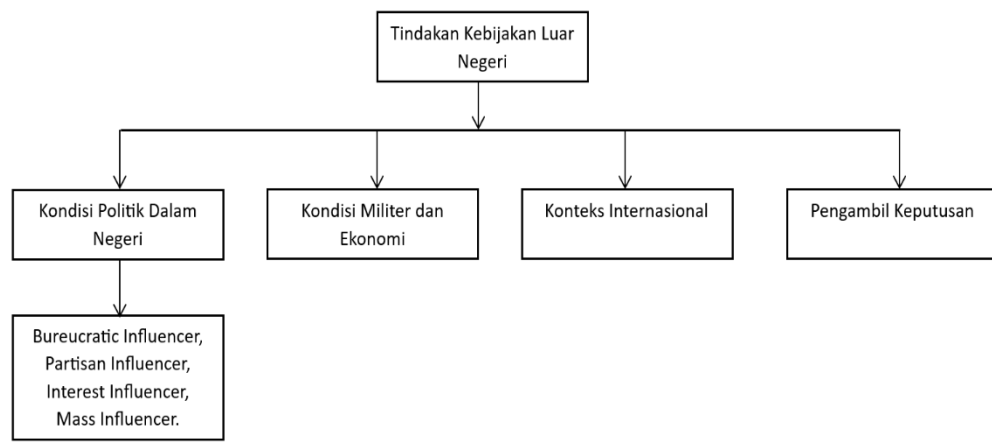
lain yaitu masyarakat negaranya dan juga mereka ditekan oleh berbagai kondisi khususnya dalam konteks politik luar negeri dan pengambil keputusan dipaksa untuk mengambil keputusan untuk masyarakat negaranya. Oleh karena itu, dijelaskan oleh Coplin jika dalam menghadapi permasalahan politik luar negeri, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh bagaimana kondisi psikologis dan pengalaman pengambil keputusan di masa lalu dalam memutuskan kebijakan luar negeri yang akan diambil. Coplin juga menyebutkan jika menurut Rosenau kepribadian dan perilaku pengambil keputusan dalam memutuskan kebijakan luar negeri disebut sebagai variabel idiosinkratik dikarenakan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pengambil keputusan dalam proses kebijakan luar negeri.

1.4.4 Konteks Internasional

Setelah kondisi domestik, militer dan ekonomi suatu negara telah terpenuhi dalam memutuskan *foreign policy*, konteks internasional juga menjadi pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Konteks internasional sendiri bisa dijelaskan dengan bagaimana letak geografis suatu negara dan biasanya berkaitan dengan adanya pengaruh negara lain yang memiliki hubungan politik maupun ekonomi. Untuk lebih jelasnya, dijelaskan oleh Coplin jika konteks internasional bisa dijelaskan melalui tiga elemen penting, yaitu aspek geografi, aspek ekonomi, dan aspek politik. Aspek geografis menjadi elemen penting karena kedekatan geografis dapat memicu ikatan antar negara. Hubungan ekonomi juga menjadi elemen yang penting karena hal ini akan berpengaruh kepada arus dagang antara kedua negara atau lebih yang mempengaruhi satu sama lain. Aspek politik juga merupakan elemen penting karena diambilnya kebijakan luar

negeri suatu negara harus mempertimbangkan hubungan dengan negara lain, seperti adanya aliansi dengan negara lain atau tidak. Mempertimbangan reaksi negara lain dari strategi luar negeri yang akan dipilih akan menjadi pertimbangan politik oleh suatu negara dalam merumuskan strategi luar negeri.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Bagan Sintesa

Sumber: Penulis

Bagan pemikiran yang dapat disusun peneliti adalah, dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri, seseorang yang mengambil keputusan akan mempertimbangkan beberapa hal seperti kondisi politik dalam negeri serta kondisi militer dan ekonomi negaranya. Selain itu, dalam menentukan kebijakan luar negeri pengambil keputusan juga harus meninjau konteks internasional dimana konteks internasional ini juga mempengaruhi situasi politik pada dalam negeri suatu negara, situasi ekonomi dan militer negara yang menjadikan strategi luar negeri negara relevan dan penting bagi negaranya sendiri. Jadi pengambil keputusan dalam isu Korea Selatan dengan China terkait pemasangan THAAD ini harus

mempertimbangkan hal tersebut sebelum memutuskan suatu *foreign policy*. Setelah dirasa kondisi politik, ekonomi dan militer dalam negeri sudah mumpuni, selanjutnya pengambil keputusan harus melihat konteks internasional sebelum pada akhirnya memutuskan *foreign policy* yang akan diambil.

1.6 Argumen Utama

Kebijakan *Three No's* Korea Selatan merupakan kebijakan luar negeri yang ditetapkan berdasarkan sejumlah faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Mengacu pada kerangka teori yang digunakan penulis, pada faktor domestik penulis berargumen jika 4 determinan memiliki pengaruh yang cukup besar dimana dalam *bureaucratic influencer*, Kementerian Luar Negeri dengan Kang Kyung Hwa sebagai menteri luar negeri banyak membantu pengambil keputusan. Adanya Partai Demokrat sebagai *partisan influencer* yang mendukung Moon Jae In yang dari awal menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemasangan THAAD di Korea Selatan juga memiliki pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan *three no's*. Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa Soseong-ri Kabupaten Seongju dalam menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap pemasangan THAAD merupakan *pengaruh interest influencer* dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Terakhir pengaruh *mass influencer* juga berpengaruh dimana seiring berjalannya waktu opini publik berubah dari mendukung pemasangan THAAD menjadi kurang setuju dari adanya THAAD ini.

Dalam faktor ekonomi dan politik, penulis berargumen jika faktor ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan *three no's*. Adanya sanksi ekonomi yang diberikan oleh China akibat adanya THAAD di Korea Selatan

tentunya mempengaruhi pengambilan kebijakan *three no's* dimana sanksi ekonomi ini berpengaruh kepada sektor pariwisata Korea Selatan, dan sektor swasta seperti Lotte dan perusahaan hiburan. Dari segi militer, penulis berargumen jika Korea Selatan sudah merasa cukup dengan sistem THAAD yang sudah terpasang di wilayah Seongju, oleh karena itu Korea Selatan menerapkan kebijakan *three no's* sebagai kebijakan luar negeri negaranya. Untuk konteks internasional, penulis berargumen jika konteks internasional ini sangat berpengaruh dimana secara geografis Korea Selatan dan China memiliki letak geografis yang cukup berdekatan. Secara ekonomi dan politik internasional, China merupakan negara yang berpengaruh bagi Korea Selatan khususnya dari sisi ekonomi yang sudah terjalin baik sejak 1992 pasca perang dingin. Hubungan politik dengan Amerika Serikat dan Jepang juga menjadi pertimbangan Korea Selatan dalam menentukan kebijakan *three no's* oleh Korea Selatan karena hubungan politik yang dimilikinya dengan Amerika Serikat dan Jepang. Faktor-faktor diatas yang kemudian menjadi pertimbangan pengambil keputusan dalam memutuskan kebijakan *three no's* untuk memperbaiki hubungan Korea Selatan dengan China.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Pada jurnal milik Herman Strydom (2013) yang mengutip pernyataan dari buku Engel dan Schutt (2010) dijelaskan jika tipe penelitian deskriptif adalah penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan kejadian yang akan diteliti tanpa bertujuan untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel yang ada. Penelitian deskriptif

akan lebih berfokus pada observasi yang rinci terhadap suatu kondisi suatu subjek yang sedang diteliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti akan lebih berfokus pada apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan *three no's* oleh Korea Selatan sesuai teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri William D. Coplin.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Tulisan ini memiliki fokus pada kebijakan *three no's* Korea Selatan untuk mengatasi keresahan China pasca diterapkannya THAAD yang dipasang di Korea Selatan di tahun 2017. Oleh karena itu, periode 2017 ini dipilih menjadi batas awal penelitian penulis dikarenakan setelah dipasangnya THAAD di Korea Selatan, China mulai melakukan sanksi ekonomi merespons adanya THAAD di Korea Selatan. Batas akhir peneliti ada di tahun 2017 juga dimana pada tanggal 31 Oktober 2017, setelah adanya normalisasi hubungan antara Korea Selatan dengan China dan menghasilkan kebijakan *three no's*. Karena fokus peneliti adalah untuk membahas apa saja faktor yang mempengaruhi diambilnya kebijakan *three no's*, tahun 2017 ini juga menjadi batas akhir penelitian.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data atau informasi yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Pada buku yang ditulis oleh Sapto dan kawan-kawan (2020) data sekunder sendiri merupakan segala bentuk informasi, fakta dan realitas yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, namun tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti. Kemudian juga disebutkan jika data sekunder bisa diperoleh melalui jurnal atau tulisan-tulisan ilmiah terdahulu, media massa, artikel resmi. Untuk

mengumpulkan data sekunder, penulis menggunakan teknik kajian literatur dimana teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari penelitian terdahulu untuk membantu penulis dalam penelitian ini (Marzali, 2016).

1.7.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis data kualitatif. Pada buku yang ditulis oleh Abdullah (2018) yang mengutip pernyataan Bogdan dan Taylor, dijelaskan jika penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Jadi bisa disimpulkan jika disini penulis akan mendeskripsikan data-data yang telah ditemukan oleh penulis dan kemudian akan diolah sehingga bisa menghasilkan data deskriptif yang baru terkait dengan fokus penelitian yang ada pada tulisan ini. Diharapkan dengan digunakannya metode penelitian kualitatif ini bisa membantu penulis untuk menjelaskan masalah pada penelitian ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi diambilnya kebijakan *three no's* oleh Korea selatan.

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan dengan isinya yaitu latar belakang yang membahas awal mula konflik antara Korea Selatan dengan China pasca diterapkannya THAAD di Korea Selatan, tinjauan pustaka, rumusan masalah, kerangka teori, sintesa pemikiran, argumen utama dan metodologi penelitian yang membahas tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB II: Akan membahas dua komponen pembahasan yang pertama adalah kondisi politik dalam negeri Korea Selatan dan pengaruhnya terhadap diambilnya kebijakan

three no's Korea Selatan yang dijelaskan melalui empat *policy influencers* yaitu *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer*. Bagian selanjutnya akan membahas faktor ekonomi dan militer Korea Selatan dalam pengambilan keputusan kebijakan *three no's*.

BAB III: Akan menjelaskan faktor konteks internasional dalam mempengaruhi diambilnya kebijakan *three no's* dan pengambil keputusan dalam mengambil kebijakan *three no's* di Korea Selatan.

BAB IV: Kesimpulan dan saran.